

Mendes Tegaskan RPL Desa Jadi Modal Bangun Kesejahteraan Masyarakat

JAKARTA (IM) - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menyatakan peningkatan kualitas SDM desa mesti dilakukan untuk menjamin kesejahteraan hidup masyarakat desa dalam jangka panjang.

Ia mendorong pemerintah daerah dan perguruan tinggi terlibat langsung menyelesaikan program RPL Desa sesuai dengan perannya.

"Ini (RPL Desa) adalah investasi yang luar biasa dan sayang untuk dilewatkan. Ini juga akan menjadi investasi pembangunan di desa dalam meningkatkan kapasitas desa," kata Halim dikutip dalam keterangan tertulis, Selasa (13/9).

Dalam FGD Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) untuk Perangkat Desa di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Senin (12/9), ia menegaskan RPL Desa merupakan salah satu langkah Kemendes PDTT menjadikan entitas desa terdapat dalam pembangunan bangsa. Selain peningkatan kualitas kepala desa maupun perangkat desa, RPL Desa juga akan memotivasi warga desa untuk terus belajar dan meningkatkan diri.

"Harapannya RPL Desa bisa meningkatkan kualitas SDM. Saya yakin bukan hanya kepala desa, perangkat desa, atau pendamping desanya yang mau belajar tapi motivasi belajar di masyarakat akan bangkit juga. Karena para perangkat bisa menginformasikan kepada masyarakat sehingga tumbuh rasa ingin untuk belajar juga," papar Halim.

Dengan adanya program tersebut, lanjutnya, pengalaman kerja di desa seperti sebagai kepala desa, perangkat desa, pendamping desa, pengurus BUM Desa dapat disetarakan dengan materi kuliah di universitas dengan berbagai program studi, sehingga berkemungkinan mendapat gelar sarjana S1 maupun doktor. Sampai saat ini program tersebut telah dilaksanakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dan Universitas Negeri Surabaya (Unesa) yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

Menyusul UNY dan Unesa, Rektor Unnes Fathur Rokhman menyatakan siap melaksanakan RPL Desa dan telah memulai dengan beberapa program yang berkaitan langsung dengan warga desa.

"Kerja sama Unnes dengan desa dilakukan dengan berbagai pola. Misalnya Unnes Lantip yang merupakan kerja sama dengan sekolah, Unnes Prigel berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan desa, Unnes Giat di mana sebuah kerja sama dilakukan dengan masyarakat dan pemerintah daerah. Unnes juga turut serta membangun desa binaan melalui program desa lingkaran kampus," jelas Fathur.

Selain FGD, pada kesempatan itu dilaksanakan pula penandatanganan nota kesepakatan antara Kemendes PDTT dengan Unnes tentang Tridharma Perguruan Tinggi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai dasar keduanya bekerja sama dengan tugas dan fungsi masing-masing. ● han

2 Polhukam

FOTO: ANT



Pangdam Cenderawasih Respons soal Tudingan TNI Seperti Gerombolan

"Dan pada pembinaan kekuatan kita loyal kepada Bapak KSAD dan ini tidak ada masalah. Moril pasukan tetap terjaga, soliditas kuat, kita punya kekuatan yang kuat, apalagi prajurit Kodam XVII/Cenderawasih ini dalam tugas sehari-hari melaksanakan kedua tugas ini, yaitu penggunaan kekuatan dan pembinaan kekuatan," ucap Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa.

JAKARTA (IM) - Sejumlah prajurit TNI protes atas pernyataan Anggota DPR

Komisi I Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti gerombolan ormas. Video pro-

tes mereka beredar di media sosial (medsos).

Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa turut memberi respons terkait polemik tersebut. Dia menyatakan bertanggung jawab atas kondisi moril dan keadaan prajurit yang berada di bawah tanggung jawabnya, khususnya prajurit TNI AD yang berada di wilayah Kodam XVII/Cenderawasih.

"Saya sampaikan kepada prajurit saya, terkait adanya komentar bahwa prajurit TNI adalah gerombolan ormas. Bahwasanya prajurit Kodam sejatinya punya satu komando,

yaitu asas komando dalam operasi penggunaan kekuatan, kita loyal pada Bapak Panglima TNI," tegas Mayjen Saleh seperti dilihat di situs Kodam Cenderawasih, Selasa (13/9).

Hal itu disampaikannya di Lapangan Denzipur 10/KYD, Waena, Abepura, Jayapura, Senin (12/9). Dia mengatakan prajurit TNI AD juga loyal terhadap Kepala Staf AD (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman.

"Dan pada pembinaan kekuatan kita loyal kepada Bapak KSAD dan ini tidak ada masalah. Moril pasukan tetap terjaga, soliditas kuat, kita punya kekuatan yang kuat, apalagi prajurit Kodam XVII/Cenderawasih ini dalam tugas sehari-hari melaksanakan kedua tugas ini, yaitu penggunaan kekuatan dan pembinaan kekuatan," ucapnya.

Dia mengatakan prajurit TNI sangat mengedepankan asas kesatuan komando. Dia menegaskan TNI solid dan bekerja untuk menjaga kesatuan bangsa.

"Saya selaku Pangdam XVII/Cenderawasih bertanggung jawab terhadap soliditas prajurit-prajurit yang ada di bawah saya. Oleh karena itu berkaitan dengan *statement-statement* berkaitan pembinaan moril prajurit, saya sangat menyayangkan. Karena TNI lahir dari rakyat dan sejarah perjuangan yang tidak mudah. Negara lahir dan terbentuk, itu juga lahirnya TNI," jelas dia.

"TNI adalah organisasi yang menjawai dan dijiwai kerakyatan, tidak ada satu pun negara di dunia yang TNI

BSSN TANGGAPI HACKER BJORKA

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Hinsa Si-burian (tengah) memberikan keterangan pers terkait hacker Bjorka di Kantor Badan Siber dan Sandi Negara, Sawangan, Depok, Jawa Barat, Selasa (13/9). Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengatakan aksi pembocoran data oleh hacker atas nama Bjorka masih terbilang berintensitas rendah dan BSSN tergabung dalam tim khusus yang dibuat pemerintah untuk menghadapi masalah kebocoran data di Indonesia.

Hakim Tolak Eksepsi Lima Terdakwa Kasus Korupsi Ekspor Minyak Goreng

JAKARTA (IM) - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak eksepsi (nota keberatan) yang diajukan oleh lima orang terdakwa dalam Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO) tahun 2022.

"Mengadili, menyatakan keberatan atau eksepsi penasih hukum terdakwa tidak dapat diterima. Menyatakan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara ini, memerintahkan penuntut umum untuk meneruskan pemeriksaan perkara terdakwa," kata ketua majelis hakim Lilek Pribawono Adi, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (13/9).

Dilansir dari Antara, sidang selanjutnya adalah pada Selasa, 20 September 2022 dengan agenda pemeriksaan empat orang saksi yang berasal dari tim verifikasi dari Kementerian Perdagangan. Keempatnya adalah Direktur Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan pada Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kemendag Farid Amir, anggota tim verifikasi Ringgo ST MM, Demak Marsulina dan Almira Fauzia.

Lima orang terdakwa dalam perkara dalam perkara ini, yaitu mantan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana, Weibianto Halimdjati alias Lin Che Wei selaku penasih kebijakan/analisis pada Independent Re-

search & Advisory Indonesia (IRAI) yang juga selaku Tim Asistensi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Master Palulian Tumanggor sebagai Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia, Stanley Ma selaku Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari, dan Pierre Togar Sitanggang selaku General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas.

Dalam surat dakwaan disebutkan tiga kelompok perusahaan tersebut seharusnya memasok minyak goreng kebutuhan dalam negeri (DMO) sejumlah 20 persen dari total ekspor CPO, namun tidak dilakukan sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara seluruhnya sejumlah Rp6.047.645.700.000 sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Nomor: PE.03/SR - 511/D5/01/2022 tanggal 18 Juli 2022, dan perekonomian negara sebesar Rp12.312.053.298.925 berdasarkan perhitungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas Gadjah Mada.

Perbuatan para terdakwa memperkaya sejumlah korporasi, yakni pertama, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Wilmar yaitu PT Wilmar Nabati Indonesia, PT Multimas Nabati Asahan, PT Sinar Alam Permai, PT Multimas Nabati Sulawesi, PT Wilmar Bioenergi Indonesia, seluruhnya sejumlah Rp1.693.219.882.064.

Kedua, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Musim Mas, yaitu PT Musim Mas, PT Musim Mas - Fuji, PT Intibenua Perkastama, PT Agro Makmur Raya, PT Megasurya Mas, PT Wira Inno Mas, seluruhnya sejumlah Rp626.630.516.604.

Ketiga, perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup Permata Hijau, yaitu dari PT Permata Hijau Palm Oleo, PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Permata Hijau Sawit, dan PT Pelita Agung Agrindustri seluruhnya sejumlah Rp124.418.318.216

Penasih hukum Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Juniver Girsang mengatakan pihaknya meminta perhitungan kerugian keuangan negara dari BPKP. "Kami minta perhitungan dari BPKP yang menyatakan ada kerugian negara. Dasarnya apa? Perhitungannya bagaimana? Kemudian apakah benar ada kerugian seperti itu dan siapa yang harus diminta pertanggungjawaban atas kerugian tersebut," kata Juniver.

Juniver yakin kliennya sudah memenuhi persyaratan DMO yang diharuskan Kemendag untuk memperoleh PE. "Kami yakin sudah memenuhi, kemudian kami minta dihadirkan di persidangan kenapa disebut tidak memenuhi? Mana yang tidak memenuhi biar kami uji di pengadilan," ujar Juniver. ● mar

KPK Lelang Rumah Hasil Rampasan Kasus Nazaruddin

JAKARTA (IM) - KPK bakal melelang barang hasil rampasan dari mantan terpidana korupsi, M Nazaruddin. Lelang akan dilakukan lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru.

"KPK bersama dan melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekanbaru akan melaksanakan lelang barang rampasan negara tanpa kehadiran peserta lelang dengan jenis penawaran lelang melalui internet (closed bidding)," kata Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri kepada wartawan, Selasa (13/9).

Ali mengatakan lelang dilakukan berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 159/Pid. Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2016 atas nama terdakwa Muhammad Nazaruddin yang telah berkekuatan hukum tetap.

KPK bakal melelang satu unit tanah beserta bangunan seluas 88 meter persegi di Pekanbaru, Riau, milik M Nazaruddin dengan nilai limit Rp2,816 miliar. Aset tersebut dijual lengkap dengan Buku Tanah Hak Milik atas nama Nazir Rahmat. "Harga limit Rp2.816.832.000 (Rp2,8 miliar) dan uang jaminan Rp600.000.000 (Rp600 juta)," jelas Ali. Disebutkan Ali, lelang bakal dilaksanakan pada Rabu (21/9). Pelelangan dapat dilakukan di laman www.lelang.go.id.

Nazaruddin merupakan mantan anggota DPR RI

yang ditetapkan sebagai tersangka suap pembangunan Wisma Atlet Sea Games di Palembang pada 30 Juni 2011. Dia sempat melarikan diri ke Kolombia sebelum akhirnya ditangkap.

Nazaruddin divonis 4 tahun dan 10 bulan penjara serta denda Rp200 juta subsidi 4 bulan di putusan Pengadilan Tipikor. Vonis itu diperberat Mahkamah Agung menjadi 7 tahun penjara.

Selain kasus suap, Nazaruddin juga dijerat dengan pasal tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan gratifikasi. Dia didakwa pencucian uang lantaran membeli sejumlah saham perusahaan dengan uang hasil korupsi.

Hukuman penjara mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu berakhir pada 14 Juni 2020. Dia bebas dari Lapas Sukamiskin setelah memperoleh cuti menjelang bebas (CMB). ● osm

PENGUMUMAN

Bahwa berdasarkan akta tanggal 12-9-2022, Nomor 1 yang dibuat dihadapan Ir. Sari Wahjuni, MSc., SH., MH., Mkn., Notaris di Kota Bandung, telah ditandatangani Akta Risetlah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. AQUATEC WISATA PRATAMA, berkedudukan di Kabupaten Bandung Barat. Bahwa ternyata tidak ada kreditur maupun pihak ketiga lain yang mengajukan tagihan atau tuntutan kepada Perseroan sehingga pembagian sisa likuidasi telah selesai dilaksanakan oleh likuidator PT. AQUATEC WISATA PRATAMA dan dengan demikian berdasarkan Surat Penerimaan Pembetulan/Pembaruan Perseroan PT. AQUATEC WISATA PRATAMA tertanggal 8-7-2022, Nomor AHU-AH.01.10-0016780, yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Notaris di Kota Bandung
Ir. Sari Wahjuni, M.Sc., S.H., M.H., M.Kn



PEMERIKSAAN TRI ATMOKO

Tersangka Kuasa Joint Operation (JO) pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Solo Kertosono (Soker) China Road and Bridge Corporation (CRBC), PT Wijaya Karya (WJKA) Tri Atmoko (kanan) berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (13/9). Tri Atmoko diperiksa sebagai tersangka yang diduga menyuap tersangka lainnya Supervisor Tim Pemeriksa Pajak pada KPP Pare - Jawa Timur Abdul Rachman sebesar Rp895 juta sebagai pelicin untuk membantu mengajukan adanya restitusi pajak (pengembalian atas kelebihan pembayaran) JO CRBC-PT WJKA-PT PP sebesar Rp13,2 Miliar pada tahun 2016 ke KPP Pare.

Airlangga Sebut KIB Tak Terpengaruh Konflik Internal PPP

JAKARTA (IM) - Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) tidak akan terpengaruh dengan konflik internal terkait kepemimpinan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) saat ini.

"Kan koalisi antarinstansi," kata Airlangga di Istana Kepresidenan, Jakarta, dilansir dari Antara, Selasa (13/9). Ia mengatakan, hingga saat ini hubungan antara tiga partai anggota KIB, yakni Partai Golkar, PPP, dan Partai Amanat Nasional (PAN), masih berjalan baik. "Itu kan urusan dalam negerinya PPP. Hubungan semua baik," tambahnya.

Diketahui pada Jumat (9/9), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) telah mengesahkan Muhammad Mardiono sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Umum DPP PPP masa bakti 2020-2025 yang berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 60, Jakarta Pusat.

Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) PPP di Serang, Minggu (4/9), yang dihadiri ketua dan sekretaris dari 27 DPW PPP se-Indo-

nesia, memutuskan untuk memberhentikan Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum dan digantikan Muhammad Mardiono.

Muhammad Mardiono saat ini menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, Suharso Monoarfa sempat menegaskan bahwa dia masih menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP berdasarkan ketentuan AD/ART partai.

Sebelumnya, pada 4 Juni 2022, Suharso sebagai Ketua Umum DPP PPP saat itu bersama dengan Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan selaku Ketua Umum DPP PAN menandatangani nota kesepahaman dibentuknya Koalisi Indonesia Bersatu di Jakarta.

Tujuan KIB ialah untuk menghentikan politik identitas dan untuk kepentingan rakyat yang bersatu. Tiga pimpinan partai politik itu juga menyepakati koalisi masih bersifat terbuka bagi partai politik lain yang ingin bergabung. Selain itu, mereka juga sepakat jika koalisi belum akan membahas calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pemilu 2024. ● dot



SIDANG PUTUSAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRASI PEMILU 2024 Anggota KPU Idham Holik (kiri) dan Mochammad Afifudin (kanan) berbicara saat mengikuti sidang dengan agenda pembacaan putusan di Gedung Baswaslu, Jakarta, Selasa (13/9). Majelis pemeriksa Baswaslu menyatakan KPU selaku terlapor tidak terbukti melanggar proses administrasi dalam proses penerimaan pendaftaran bagi parpol calon peserta Pemilu 2024.